

Judul : Pedagang mogok jualan daging sapi, komisi VII harapkan harga pangan stabil
Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pedagang Mogok Jualan Daging Sapi

Komisi VII Harapkan Harga Pangan Stabil

Kalangan Senayan berharap Pemerintah menstabilkan harga daging sapi menjelang bulan Ramadan. Hal ini menyusul lonjakan harga daging sapi di pasaran yang mencapai Rp 140 ribu per kilogram, khususnya di wilayah Banten dan Yogyakarta.

ANGGOTA Komisi VI DPR Imas Aan Ubudiyah mengatakan, salah satu solusi menekan kenaikan harga adalah dengan melakukan impor. "Kebijakan pemberian izin impor daging sapi sebesar 250 ribu ton kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi solusi konkret untuk menekan harga," tegas Imas dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Diketahui, tingginya harga daging memicu aksi mogok berjualan oleh ratusan pedagang di Cianjur, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas tingginya harga di tingkat pengecer.

Imas melanjutkan, kuota impor sebesar itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Jangan sampai masyarakat tetap membeli dengan harga mahal, sementara negara sudah membuka keran impor besar-

besaran. "Pemerintah harus hadir memastikan harga tetap terjangkau," tandas politikus PKB ini. Imas mengingatkan, periode Ramadan selalu menjadi waktu rawan kenaikan harga pangan akibat lonjakan permintaan. Karena itu, pemberian izin impor, baik kepada BUMN maupun pihak swasta sebesar 30 ribu ton, seharusnya menjadi instrumen negara untuk melakukan intervensi pasar secara efektif.

"Jaminan ketersediaan stok saja tidak cukup tanpa diikuti pengawasan ketat terhadap distribusi," kata Imas mengingatkan.

Imas mengkhawatirkan jika tidak ada pengendalian tegas, kebijakan impor hanya akan menjadi langkah administratif yang tidak dirasakan manfaatnya oleh konsumen akhir. Stabilitas harga pangan adalah tanggung jawab negara. Jangan biarkan



Imas Aan Ubudiyah

mekanisme pasar berjalan tanpa kendali ketika kebutuhan masyarakat meningkat tajam.

Imas berharap, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait segera melakukan operasi pasar dan pengawasan jalur distribusi agar gejolak harga dapat diredam sebelum memasuki bulan Ramadan. "Negara wajib memastikan kebijakan impor ini benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah," tegasnya.

Senada, anggota Komisi IV DPR Hindun Anisah mendesak

Pemerintah segera melakukan intervensi atas tingginya harga daging sapi. Karena, meroketnya harga daging sapi di pasaran saat ini semakin dikeluhkan para pedagang. "Saya minta Pemerintah turun tangan dan menertibkan rumah potong hewan (RPH)," desaknya.

Dia menyebut, banyak pedagang mengeluhkan biaya operasional yang tinggi karena tarif RPH terlalu mahal, padahal harga sapi hidup relatif stabil. Alhasil, banyak pedagang daging sapi protes karena minat pasar terus menurun akibat harga yang kian melambung. "Kenaikan harga daging sapi ini menekan daya beli masyarakat dan membuat pedagang berada di posisi sulit," kata politikus PKB ini.

Bila pedagang dipaksa menyembelih sapi sendiri, tentu itu tidak efisien dan justru memberatkan. "Intervensi Pemerintah penting agar biaya operasional tidak terlalu membebani pedagang," harap dia.

Selain itu, ia menyoroti, harga sapi hidup dari 'feedloter' yang dinilai pedagang terlalu tinggi.

Sehingga para pedagang tidak memiliki banyak pilihan karena pasokan sapi potong saat ini didominasi oleh feedloter besar. "Pedagang mengeluh karena harga beli sapi tidak sebanding dengan daya serap pasar. Ini membuat rantai usaha dari hulu ke hilir tidak sehat," ujar dia.

Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan, penugasan impor daging sapi kepada BUMN telah sepenuhnya diterbitkan. Begitu pula dengan kuota impor untuk pelaku swasta juga mulai direalisasikan.

"Semua penugasan BUMN 250 ribu (ton) sudah keluar semua. Juga swasta 30 ribu (ton) kuota," kata Tommy di Kantor Kemendag, Jumat (23/1/2026).

Tommy menegaskan saat ini proses importasi daging sapi tinggal menunggu tahap realisasi impor. Adapun, BUMN yang mendapat penugasan impor daging sapi tersebut adalah anggota ID Food, yakni PT Berkidari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). ■ TIF